

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Theodorus M, Tuanakotta.2009.*Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta : Salemba Empat
- Mertokusumo,Sudikno.2012. *Teori Hukum*.Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Marwan dan Jimmy. P. 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Mulyadi,Lilik. 2007. *Hukum AcaraPidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*,Bandung : PT. Alumni.
- Chazawi,Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT.Alumni.
- Teten Masduki dan Danang Widyoko.2005. *Menunggu Gebrakan KPK* (Cetakan 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap,M.Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan, Prinst, 2002. *PemberantasanTindak Pidana Korupsi*. Bandung:..PT. Citra Aditya Bakti.
- Ermansjah Djaja. 2010. *MeredesainPengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan 1).Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, M.2003. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP,Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi kedua). Jakarta : Sinar Grafika.
- Idi Subandy ,Ibrahim. 2004. *Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Moh. Nazir.2011. *Metode Penelitian Hukum*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud.2011. *Penelitian Hukum*.Jakarta : Prenada Media Group.
- Kuffal, H.M.A.2005.*Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press
- ,2002. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Kaitannya Dengan Pembaruan Kejaksaan*. Jakarta: Media Hukum.

- Kaligis,O.C.2011. *Deponering Teori dan Praktik*.Bandung : Alumni.
- Darmono. 2013.*Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Solusi Publishing
- Hamzah,Andi.2006.*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta : Cv. Diadit Media.
- Iswahyudi,Sudhono. 2003, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi*. Jakarta: Puslitbang.
- Mohammad Taufik Makarso dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sofyan,Andi. 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta : PT. Rangkang Education.
- Hadisoepipto,Hartono S.H., 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Nugroho,Hibnu. 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.Jakarta : Media Prima Aksara.
- Poernomo,Bambang. *Pola Dasar Teori Atas Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Abidin,A.Z. *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syamsuddin,Aziz. 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran
- Wiyono,R. 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Edisi kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Jampidsus Kejaksaan Agung RI.2010.“*Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

Purwaning M. Yanuar.2007. “*Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Bandung: PT Alumni.

Internet

Effendi,Ahmad.”Opini Salah Tangkap KPK”.*Seputar Indonesia* 17 September 2016.(<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/salah-sangkaterhadap-kpk>).Diakses tanggal 20 September 2016

Rangga,Yahya.” Penghentian Kasus PT.ANGKASA PURA I Dinilai Mencurigakan.” *Berita Nasional* 2 Juni 2016.(<http://nasional.inilah.com/read/detail/2212963/penghentian-kasus-ap-i-dinilai-Mencurigakan>).diakses tanggal 2 Desember 2016

Kejaksaan Republik Indonesia, *Sejarah*,
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*,
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada tanggal 30 Desember 2016.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Tugas dan Wewenang*,
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7, diakses pada tanggal 3 Januari 2016.

Ramadhan,Syahrul. Hukum Acara Pidana,
<http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

Effendy,Marwan.”SP3 Produk Hukum atau Politik “,*Media Indonesia* 4 Agustus 2004. (<http://www.antikorupsi.org/id/content/sp-3-produk-hukum-atau-politik-04080>).Diakses tanggal 3 Maret 2017

Ikhsan,Muhammad.” Penanganan Pekara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal UMS*. 20 September 2010 hukum.ums.ac.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=47.Diakses tanggal 20 Maret 2017

Bagirmanan, Surat Edaran Jampidsus boleh dituruti,
<https://www.news.metrotvnews.com/read/2014/01/29/211693/Baqir-surat-edaran-jampidsus-boleh-dituruti> tanggal 29 januari 2014.Diakses tanggal 20 Maret 2017

Santika, Pengembalian Uang Kasus Korupsi. *Analisa daily*.<http://www.analisadaily.com/news/read/pe-ngembalian-uang-korupsi-kasus-dihentikan/5454/2014/02/11> tanggal Selasa, 11 Februari 2014. Diakses tanggal 20 Maret 2017

Jurnal Ilmiah

Sugama, I Dewa. "Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum*. Volume 2 .No.3. Tahun 2012. Denpasar : Bali

Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP3 kasus Korupsi", 2013. Volume 22. No.2 Tahun 2013. *Jurnal Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam

Syahputra, gani. "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Agung dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004". *Jurnal Hukum*. Vol 2 Nomor 1. Februari 2014. Medan : Universitas Sumatra Utara Jurnal.

Hanni S, Vincentia "KPK. Jaksa, Polisi mampukah berantas korupsi ? *Jurnal Hukum*. Vol 3. No 4 Tahun 2014. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ridlwani, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Effendy, Marwan dalam Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Fiat Justitia*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, halaman 4, diunduh dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf>, pada tanggal 30 Juli 2016.

Lasmadi, Sahuri. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, 3 (Juli 2010)

Noor, H.A Rasyid. 2009, "Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia", *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXIV No. 278 Januari 2009.

M. Husein, Harun. 2000. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suradji, Mugiyati, Sutriya, *ed.*, *Pengkajian tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008 (Dalam Prof. Dr. Muladi, *Hakikat Suap dan Korupsi*)

Effendy, Marwan. “*Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, disampaikan di Manado, 4 Oktober 2012 pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi.

Surat Kabar

Setiawan, Heri. “Rubrik Opini : Deponeering Kasus Bibit & Chandra.”
Harian Kompas 18 Oktober 2012

Abduh, Muhammad “Penghentian Penyidikan Tindak Pidana dan Penyelesaian di Luar Pengadilan Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang”. *Harian Kompas* 15 Mei 2012

Kejaksaan Agung RI, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-113/F/ Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Atmasasmita, Romli. “Efektifitas Hukum Badan (Penjara)”, *Harian Seputar Indonesia*, tanggal 14 Februari 2013.

Yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi. *Yurisprudensi* Reg.No.29/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang kewenangan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyampingan perkara.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

_____, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dari KKN

_____, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

_____, Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak

pidana korupsi

_____, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan
KUHAP

_____, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan Dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia*, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
12 Tahun 2009, BN. No. 429 Tahun 2009

_____, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-
338/C/Cr.2/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.

